



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/142/IV.01/HK/2023**

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan lebih terarah, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yaitu melalui pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan program dan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan rencana kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dengan kode rekening 6-01.0-00.0-00.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/142/IV.01/HK/2023
TANGGAL : 10 - 2 - 2023

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Provinsi Lampung.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap pemeriksaan tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal terdiri dari audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 **adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022** tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Proses penyusunan PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap pertama adalah menentukan *audit universe* (peta auditan). Kriteria untuk menentukan peta auditan antara lain: kebijakan pengawasan (jakwas); anggaran Perangkat Daerah; dampak ke masyarakat; dan kontribusi terhadap tujuan pemerintah daerah. Selanjutnya dibuat skoring untuk menentukan Perangkat Daerah terpilih yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan.

Tahap kedua adalah menentukan program prioritas yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas tersebut berdasarkan faktor risiko antara lain kontribusi terhadap tujuan pemerintah daerah; risiko inheren; anggaran program; signifikansi keberhasilan program; dampak terhadap masyarakat; keahlian personil APIP; pengalaman APIP; dan jumlah SDM. Terhadap pemeriksaan/Audit kinerja, program pengawasan yang dipilih adalah berdasarkan program yang memiliki skor **"sangat tinggi/tinggi"** dengan mempertimbangkan audit kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi acuan Kinerja Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 antara lain:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kabupaten,Kota Sebagai Peran GWPP (Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat) Terdiri dari :

- a) **Pembinaan dan Pengawasan UMUM: terdapat 9 Aspek Pengawasan UMUM** (Aspek Pembagian Urusan, Aspek Kebijakan Daerah, Aspek Kerja Sama Daerah, Aspek Kelembagaan Daerah, Aspek Pembangunan Daerah, Aspek Kepegawaian Pada Perangkat Daerah, Aspek Keuangan Daerah, Aspek Pelayanan Publik daerah, Aspek Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)
- b) **Pembinaan dan Pengawasan Teknis : terdapat 32 Urusan Pengawasan Teknis** (Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Ketentraman masyarakat dan Linmas, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pangan, pertanahan, lingkungan Hidup, Admiduk dan Capil, Pemberdayaan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Kominfo, Koperasi & UMKM, Penanaman Modal,

- c) Pemuda dan Olahraga, Persandian, Kearsipan, Bidang Kelautan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perindustrian, Transmigrasi).

1. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah, terdiri dari 4 fokus yaitu :

- A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.** Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
- I. pemeriksaan ketaatan** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - II. pemeriksaan kinerja.**
- B. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pelaksanaan :
- 1)Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah sebagai berikut :
 - a) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b) Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
 - c) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - d) Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - 2)Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - b) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - c) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - d) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 - e) Pengelolaan barang milik daerah.
 - 3)Reviu Laporan Keuangan meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - 4)Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi :
 - a) Probitas audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;
 - b) Reviu laporan kinerja;
 - c) Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)Laporan kinerja (reviu);
 - d) Perhitungan Kerugian Keuangan daerah (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu);
 - e) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi

- f) Pengelolaan keuangan desa (monev).
- g) Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

C. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas dengan rincian pelaksanaan Tugas :

- 1) Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN;
- 2) Pengendalian gratifikasi;
- 3) Pelaksanaan survei penilaian integritas;
- 4) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi : SPIP, penilaian Zona Integritas, Pengelolaan WBS;
- 6) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
- 7) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
- 8) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
- 9) Pemeriksaan investigatif.
- 10) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- 11) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.

D. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- 1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3,
- 2) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah,
- 3) Penerapan manajemen risiko,
- 4) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

1. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Layanan Jasa Konsultasi.

Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien, terarah serta terkoordinasi maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung agar dapat berjalan selaras dengan sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi serta 33 (tiga puluh tiga) Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PKPT

Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 mencakup seluruh kegiatan Pengawasan Intern terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsinya. Sedangkan Sekretariat Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai peran sebagai penunjang kegiatan pengawasan dengan melaksanakan dukungan teknis, dan administratif serta pelaksanaan reviu yang ditentukan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

II. DEFINISI

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
14. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan Pemeriksaan intern oleh APIP.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Pemeriksaan Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
19. Pemeriksaan ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instansi telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern instansi maupun pihak ekstern instansi tersebut.
20. Pemeriksaan akhir masa jabatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepala daerah yang berakhir masa jabatannya.
21. Probity audit adalah pemeriksaan yang diberikan oleh APIP untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran, yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Probity audit juga merupakan upaya untuk memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko pengadaan barang/jasa melalui peran APIP
22. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
23. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau

tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang menjadi rujukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2023 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini adalah:

1. Terlaksananya pengawasan termasuk didalamnya kegiatan penguatan pengawasan, secara efisien, efektif dan ekonomis;
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Ketentuan Umum

- a. Program Pemeriksaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara efisien dan efektif.
- b. Penugasan APIP dihindarkan dari konflik kepentingan (*conflict of interest*)
- c. Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kriteria Penetapan Pelaksanaan pengawasan

- a. Penetapan hari pemeriksaan ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan.
- b. Susunan Tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdiri dari :

No	Peran	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Inspektur
2.	Pembantu/Wakil Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu
3.	Pengendali Teknis	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Madya.
4.	Ketua Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda.

5.	Anggota Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda. Auditor/PPUPD Pertama, Auditor Trampil, dan Pelaksana Bersertifikat
----	-------------	--

Dasar Penyusunan Tim mempertimbangkan :

1. Kompetensi dan kapabilitas
2. Pengalamam.
3. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
4. Keseimbangan tim
5. Risiko pembinaan dan pengawasan.
6. Jarak dan lokasi pembinaan dan pengawasan.

V. ANGGARAN

Anggaran Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,120,727,468.95
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6,321,415,000.00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	1,042,162,000.00
TOTAL		44,484,304,468.95

VI. PENUTUP

Demikian Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun untuk menjadi Pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
 Di LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**1) PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BENTUK PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
 PEMERINTAH PUSAT (GWPP).**

No.	FOKUS	Jadwal (M.B.T)		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	PENGAMPU	
		RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	(6)		
1.	Kabupaten Lampung Utara	01.07.23	02.08.23	2	3	12	12	12	48	77	58.346.000	Gabungan	IRBAN I
2.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	01.07.23	02.08.23	2	3	12	12	12	48	77	58.466.000	Auditor dan PPUPD	IRBAN I
3.	Kabupaten Tulang Bawang	01.07.23	02.08.23	2	3	12	12	12	48	77	58.346.000		IRBAN I
4.	Kabupaten Mesuji	01.07.23	02.08.23	2	3	12	12	12	48	77	58.538.000		IRBAN I
5	Kota Bandar Lampung.	01.06.23	02.07.23	2	3	7	7	56	75	11.250.000			IRBAN II
6	Kabupaten Pringsewu	01.09.23	02.10.23	2	3	12	12	48	77	58.072.000,-			IRBAN II
7	Kabupaten Pesawaran	01.06.23	02.07.23	2	3	7	7	56	75	57.578.100			IRBAN II
8	Kabupaten Tanggamus	01.09.23	01.10.23	2	3	14	14	56	89	58.238.000,-			IRBAN II
9	Kabupaten Pesisir barat	01.07.23	02.08.23	2	8	8	8	48	72	57.510.000			IRBAN III
10	Kabupaten Lampung Barat.	01.07.23	02.08.23	2	9	9	9	72	99	58.320.000			IRBAN III
11	Kabupaten Way Kanan.	01.07.23	02.08.23	2	8	8	8	48	72	58.140.000			IRBAN III
12	Kota Metro	01.07.23	02.08.23	2	7	14	14	42	89	58.340.000			IRBAN IV
13	Kabupaten Lampung Timur	01.09.23	02.10.23	2	10	11	11	33	67	57.876.000			IRBAN IV
14	Kabupaten Lampung Selatan.	01.06.23	01.07.23	2	8	10	10	40	70	58.364.000			IRBAN IV
15	Kabupaten Lampung Tengah	01.07.23	02.08.23	2	6	10	10	40	68	58.310.000			IRBAN IV

Catatan :

RMP = rencana mulai pemeriksaan

RPL = Rencana Penyelesaian Laporan

2) PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DILAKUKAN TERHADAP PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM BENTUK:

a. Pemeriksaan Kinerja/ Audit Kinerja.

(didasarkan Pada Skor resiko Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah dan yang akan dilakukan pemeriksaan kinerja adalah program yang beresiko **SANGAT TINGGI**),

No. (1)	Area Pengawasan (2)	Jenis Pengawasan (3)	Tujuan Sasaran (4)	Jadwal (5)		PJ	WK/PJ	HP (6)			Anggaran (7)	Jumlah Laporan (8)	Sarana & Prasarana (9)	Tingkat Risiko (10)	Keterangan TUGAS (11)
				RMP	RPL			PT	KT	AT					
1.	Dinas Pendidikan	Audit Kinerja	Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program yang memiliki Resiko Sangat Tinggi	03.07.23	26.07.23	-	7	7	7	7	4.200.000	1	-	Sangat Tinggi	Auditor Irbanwil IV
2.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dan UPTD	Audit Kinerja	Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program yang memiliki Resiko Sangat Tinggi	16.10.23	02.11.23	-	-	7	7	28	7.350.000	1	-	Sangat Tinggi	Auditor Irbanwil III

b. Pemeriksaan Ketaatan/Audit Ketaatan.
(didasarkan Pada Skor Resiko Program di Perangkat Daerah, dan yang akan dilakukan pemeriksaan ketaatan adalah program yang beresiko **TINGGI**.)

No. (1)	Area Pengawasan (2)	Jenis Pengawasan (3)	Tujuan Sasaran (4)	Jadwal (5)		HP (6)						Anggaran (7)	Jumlah Laporan (8)	Sarana & Prasarana (9)	Tingkat Risiko (10)	Keterangan TUGAS (11)	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1)	Badan Pendapatan Daerah	Audit Ketaatan	Memberikan keyakinan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	19.06.23	03.07.23	-	-	10	10	20	20	40	6.000.000	2		Tinggi	Auditor
2)	DPMPPTSP	Audit Ketaatan		14.11.23	28.11.23			10	10	20	20	40	6.000.000	1		Tinggi	Auditor
3)	Dinas Perkebunan	Audit Ketaatan		14.03.23	30.03.23	-	-	10	10	20	20	40	6.000.000	1		Tinggi	Auditor
4)	Biro Perekonomian	Audit Ketaatan		21.06.23	22.06.23	-	-	2	2	4	4	8	1.200.000	1		Tinggi	Auditor
5)	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Audit Ketaatan		01.08.23	14.08.23	-	-	10	10	20	20	40	6.000.000	1		Tinggi	Auditor
6)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Audit Ketaatan		27.11.23	30.11.23	-	-	4	4	8	8	16	2.400.000	1		Tinggi	Auditor
7)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Audit Ketaatan		19.12.23	29.06.23	-	-	7	7	14	14	8	4.200.000	1		Tinggi	Auditor
8)	BPKAD	Audit Ketaatan		16.06.23	30.06.23	-	-	10	10	20	20	40	6.000.000	1		Tinggi	Auditor

9)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Audit Ketaatan	18.10.23	31.10.23				10	10	20	40	6.000.000	1		Tinggi	Auditor
10)	Dinas Koperasi dan UKM	Audit Ketaatan	11.09.23	22.09.23	-	-	10	10	20	40	6.000.000	6.000.000	1		Tinggi	Auditor
11)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Audit Ketaatan	20.06.23	20.07.23	-	-	10	10	20	40	6.000.000	6.000.000	2		Tinggi	Auditor
12)	BAPPEDA	Audit Ketaatan	18.09.23	20.10.23			10	10	20	40	6.000.000	6.000.000	1		Tinggi	Auditor
13)	Dinas Peternakan dan Kewan	Audit Ketaatan	01.12.23	02.01.24	-	-	10	10	20	40	6.000.000	6.000.000	1		Tinggi	Auditor
14)	Dinas Kesehatan	Audit Ketaatan	03.11.23	03.11.23		2	5	5	20	32	4.800.000	4.800.000	1		Tinggi	Auditor
			04.11.23	04.11.23		2	5	5	20	32	4.800.000	4.800.000	1		Tinggi	Auditor
			01.12.23	01.12.23		2	5	5	20	32	4.800.000	4.800.000	1		Tinggi	Auditor
			02.12.23	02.12.23		2	5	5	20	32	4.800.000	4.800.000	1		Tinggi	Auditor
15)	Biro Umum	Audit Ketaatan	03.07.23	02.08.23		2	5	5	20	32	4.800.000	4.800.000	1		Tinggi	Auditor
16)	Biro Kesra	Audit Ketaatan	03.10.23	01.11.23		2	5	5	20	32	4.800.000	4.800.000	1		Tinggi	Auditor
17)	Dinas Perpustakaan	Audit Ketaatan	04.03.23	01.04.23			5	5	20	30	4.500.000	4.500.000	1		Tinggi	Auditor
18)	RSUDAM	Audit Ketaatan	01.06.23	03.06.23			5	5	20	30	4.500.000	4.500.000	1		Tinggi	Auditor
19)	DISPORA	Audit Ketaatan	04.06.23	01.07.23			5	5	20	30	4.500.000	4.500.000	1		Tinggi	Auditor
20)	Dinas PP & PA	Audit Ketaatan	04.06.23	01.07.23			5	5	20	30	4.500.000	4.500.000	1		Tinggi	Auditor
21)	PSDA	Audit Ketaatan	20.06.23	27.06.23	-	-	10	10	20	40	4.200.000	4.200.000	1		Tinggi	Auditor
22)	Dinas Lingkungan Hidup	Audit Ketaatan	02.04.23	09.06.23	-	-	10	10	20	40	3.600.000	3.600.000	2		Tinggi	Auditor
23)	Dinas Kehutanan	Audit Ketaatan	10.04.23	20.04.23	-	-	10	10	20	40	3.450.000	3.450.000	2		Tinggi	Auditor

3) AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
a) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana Keuangan Daerah.

No.	FOKUS	SASARAN	Jadwal		HP						Anggaran	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)	
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	<p>a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</p> <p>c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah</p>	15.05.23 18.09.23	25.05.23 13.10.23	5 5	6 6	6 6	6 6	6 6	12 12	35 35	5.250.000,- 5.250.000,-	PPUPD
2.	Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	<p>a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, Kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>											PPUPD
	1)	BAPPEDA	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	2)	Dinas Kelautan dan Perikanan	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	3)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	4)	BPKAD	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	5)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	6)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	7)	Badan Pendapatan Daerah	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	8)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	9)	Dinas Perkebunan	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	10)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	11)	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	12)	Badan Penelitian dan Pengembangan.	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	13)	Biro Perencanaan	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	20	3.000.000	
	14)	Dinas Sosial	01.10.23	03.10.23			3	3	3	3	15	2.250.000	

No.	FOKUS	SASARAN	Jadwal		HP					Anggaran	Keterangan TUGAS		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)		
15)		Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.	01.10.23	03.10.23				3	3	3	15	2.250.000	
16)		Dinas Tenaga Kerja	01.10.23	03.10.23				3	3	3	15	2.250.000	
17)		Dinas Pemuda dan Olahraga											
18)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA											
19)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
20)		Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek											
21)		Badan Penghubung											
22)		Biro Umum	01.10.23	03.10.23				3	3	3	15	2.250.000	
23)		Biro Administrasi Pimpinan											
24)		Biro Kesejahteraan Rakyat	01.10.23	03.10.23				3	3	3	15	2.250.000	
25)		Rumah Sakit Jiwa	01.10.23	03.10.23				3	3	3	15	2.250.000	
26)		Biro Pengadaan barang dan Jasa	01.06.23	01.07.23				5	5	15	25	3.750.000	
27)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	04.06.23	04.07.23				5	5	15	25	3.750.000	
28)		Dinas Kehutanan.	04.05.23	04.06.23				5	5	15	25	3.750.000	
29)		Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya.	03.05.23	03.06.23				5	5	15	25	3.750.000	
30)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	01.05.23	01.06.23				5	5	15	25	3.750.000	
31)		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	01.05.23	01.07.23				5	5	15	25	3.750.000	
32)		Dinas Lingkungan Hidup	04.05.23	01.05.23				5	5	15	25	3.750.000	
33)		Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.	04.04.23	04.06.23				5	5	15	25	3.750.000	
34)		Dinas Perhubungan	01.07.23	04.05.23				5	5	15	25	3.750.000	
35)		Biro Administrasi Pembangunan	02.07.23	01.08.23				5	5	15	25	3.750.000	
36)		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	04.09.23	02.10.23				5	5	5	15	2.250.000	
37)		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.	11.09.23	11.10.23				5	5	5	15	2.250.000	
38)		Biro Pemerintahan dan Otda.	18.09.23	18.10.23				4	4	4	12	1.800.000	
39)		Dinas KOMINFO.	04.09.23	02.10.23				5	5	5	20	3.000.000	
40)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	11.09.23	11.10.23				4	4	4	12	1.800.000	
41)		Biro Hukum.	18.09.23	18.10.23				4	4	4	12	1.800.000	
42)		Sekretariat DPRD.	11.09.23	11.10.23				5	5	5	15	2.250.000	
43)		Badan Kepegawaian Daerah.	18.06.23	18.10.23				5	5	5	15	2.250.000	
44)		Badan Pengembangan SDM Daerah.	25.06.23	10.11.23				4	4	4	12	1.800.000	
45)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	01.06.23	02.07.23				4	4	4	16	2.400.000	

No.	FOKUS	SASARAN	Jadwal		HP						Anggaran	Keterangan TUGAS		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)									(5)	(6)	(7)
	46)	Dinas Kependudukan dan Capil.	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	4	16	2.400.000	
	47)	Biro Organisasi.	01.06.23	02.07.23		4	4	4	4	4	16	2.400.000		
3.	Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.	a) pengujian konsistensi/ dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. b) pengujian penganggaran kaidah dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah	24.05.23	31.05.23	-	-	6	6	6	30	42	6.300.000	AUDITOR dan PPUPD	
			07.08.23	14.08.23	-	-	6	6	6	30	42	6.300.000		
4.	Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.	a) pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.											AUDITOR dan PPUPD	

No.	FOKUS (2)	SASARAN (3)	Jadwal		HP						Anggaran (6)	Keterangan TUGAS (7)
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
				(4)				(5)				
	1)	BAPPEDA	01.09.23 s.d 08.09.23	11.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	2)	Dinas Kelautan dan Perikanan			2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	3)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		18.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	4)	Badan Pendapat Daerah	01.09.23 s.d 08.09.23	11.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	5)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		18.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	6)	Dinas Perkebunan		02.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	7)	BPKAD	01.09.23	02.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	8)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	03.09.23	04.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	9)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	05.09.23	06.09.23	2	2	2	2	2	8	16	2.400.000
	10)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01.09.23	05.09.23	2	2	2	2	2	10	14	2.100.000
	11)	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan	05.09.23	06.09.23	2	2	2	2	2	10	14	2.100.000
	12)	Badan Penelitian dan Pengembangan	07.09.23	08.09.23	2	2	2	2	2	10	14	2.100.000
	13)	Biro Perencanaan	11.09.23	12.09.23	2	2	2	2	2	10	14	2.100.000
	14)	Dinas Sosial	02.08.23	02.08.23	2	3	18	18	18	95	171	14.250.000
	15)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.	02.10.23	02.10.23	2	3	18	18	18	95	171	14.250.000
	16)	Dinas Tenaga Kerja										
	17)	Rumah Sakit Jiwa										
	18)	Biro Kesejahteraan Rakyat										
	19)	Biro Umum										
	20)	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	01.08.2023	02.08.23			4	4	4	12	20	3.600.000
	21)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	01.08.2023	02.08.23		4	4	4	4	12	20	3.750.000
	22)	Biro Administrasi Pimpinan	01.08.2023	02.08.23			4	4	4	12	24	
	23)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	01.08.2023	02.08.23			4	4	4	12	20	
	24)	Dinas Pemuda dan Olahraga	01.08.2023	02.08.23			4	4	4	12	20	
	25)	Badan Penghubung										
	26)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	11.09.23	14.09.23			1	1	1	16	18	3.600.000
	27)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15.09.23	19.09.23			1	1	1	12	14	2.700.000
	28)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	1.9.23	8.9.23		1	1	1	4	6	5	4.195.000
	29)	Dinas Lingkungan Hidup	18.09.23	22.09.23		1	1	1	4	6	3	2.700.000
	30)	Dinas Kehutanan.	25.09.23	29.09.23		1	1	1	4	6	3	2.700.000
	31)	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.	12.09.23	15.09.23		4	4	4	4	4	16	3.000.000
	32)	Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya.	18.09.23	21.09.23		4	4	4	4	4	16	3.000.000
	33)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.09.23	20.09.23			4	4	4	26	24	3.600.000

No.	FOKUS (2)	SASARAN (3)	Jadwal		HP				Anggaran	Keterangan TUGAS (7)	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT
				(4)				(5)	(6)		
	34)	Dinas Perhubungan	11.09.23	14.09.23		3	3	3	12	21	3.150.000
	35)	Biro Administrasi Pembangunan	25.05.23	27.09.23		3	3	3	12	18	2.700.000
	36)	Inspektorat									
	37)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	25.09.23	25.10.23		4	4	4	12	20	3.000.000
	38)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.	02.10.23	02.11.23		4	4	4	12	20	3.000.000
	39)	Biro Pemerintahan dan Otda.	06.10.23	06.11.23		3	3	3	9	15	2.250.000
	40)	Dinas KOMINFO.	25.09.23	25.10.23		4	4	4	12	24	3.600.000
	41)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	02.10.23	02.11.23		3	3	3	9	15	2.250.000
	42)	Biro Hukum.	06.10.23	06.11.23		3	3	3	9	15	2.250.000
	43)	Sekretariat DPRD.	25.09.23	25.10.23		4	4	4	12	20	3.000.000
	44)	Badan Kepegawaian Daerah.	02.10.23	02.11.23		4	4	4	12	20	3.000.000
	45)	Badan Pengembangan SDM Daerah.	06.10.23	06.11.23		3	3	3	9	15	2.250.000
	46)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	01.09.23	11.09.23		2	2	2	8	16	2.400.000
	47)	Dinas Kependudukan dan Capi.	08.09.23	18.09.23		2	2	2	8	16	2.400.000
	48)	Biro Organisasi.	25.09.23	25.10.23		2	2	2	8	16	2.400.000

b) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	FOKUS	Sasaran	Jadwal		PJ	HP				Anggaran	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL		Wk/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
1.	(2) Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.	(3) a) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d) penagihan piutang daerah.	(4) 15.05.23 05.10.23	25.05.23 13.10.23	- -	7 7	7 7	7 7	14 14	28 28	(6) 4.200.000 4.200.000	(7) Auditor
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah.	a) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.										
	1)	Badan Pendapatan Daerah	05.06.23	19.06.23	-	10	10	10	20	40	6.000.000	
	2)	DPMTSP	13.10.23	27.10.23		10	10	10	20	40	6.000.000	
	3)	Dinas Perkebunan	09.08.23	24.08.23		10	10	10	20	40	6.000.000	
	4)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	07.09.23	21.09.23	-	10	10	10	20	40	6.000.000	
	5)	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	01.08.23	14.08.23	-	10	10	10	20	40	6.000.000	
			27.09.23	11.10.23	-	10	10	10	20	40	6.000.000	
			22.05.23	06.06.23	-	10	10	10	20	40	6.000.000	
	6)	Balitbang Provinsi Lampung	13.11.23	24.11.23		10	10	10	20	40	6.000.000	
	7)	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	26.06.23	07.07.23		10	10	10	20	40	6.000.000	

No.	FOKUS (2)	Sasaran (3)	Jadwal		HP					Anggaran (6)	Keterangan TUGAS (7)	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
				(4)				(5)				
	8)	BPKAD	02.06.23	15.06.23	-			10	10	20	40	6.000.000
	9)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	04.12.23	15.12.23				10	10	20	40	6.000.000
	10)	Dinas Koperasi dan UKM	09.10.23	20.11.23				10	10	20	40	6.000.000
	11)	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.11.23	30.12.23	-			10	10	20	40	6.000.000
			19.07.23	19.08.23	-			10	10	20	40	6.000.000
	12)	Bappeda	15.08.23	14.09.23				10	10	20	40	6.000.000
	13)	Dinas Peternakan dan Keswan	11.10.23	11.11.23	-			10	10	20	40	6.000.000
	14)	Dinas Sosial	01.07.23	04.07.23	2	5		12	12	48	79	11.850.000
	15)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.	01.07.23	04.07.23	2	5		12	12	48	79	11.850.000
	16)	Dinas Tenaga Kerja	01.07.23	04.07.23	2	5		12	12	48	79	11.850.000
	17)	RSUDAM	02.06.23	04.06.23				8	8	32	48	7.200.000
	18)	Dinas PPPA	04.08.23	03.09.23				8	8	32	48	7.200.000
	19)	Dinas Pemuda dan Olahraga	01.07.23	03.07.23				10	10	40	60	9.000.000
	20)	Dinas Perpustakaan	01.04.23	03.04.23				8	8	32	48	7.200.000
	21)	Biro Adpim	04.10.23	02.11.23				8	8	32	48	7.200.000
	22)	Badan Penghubung	01.05.23	02.05.23				3	3	12	18	-
			02.11.23	02.11.23				4	4	12	20	
	23)	Biro Umum	01.07.23	04.07.23	2	5		12	12	48	79	11.850.000
	24)	Biro Kesejahteraan Rakyat	01.07.23	04.07.23	2	5		12	12	48	79	11.850.000
	25)	Rumah Sakit Jiwa	01.09.23	04.09.23	2	5		12	12	48	79	11.850.000
	26)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	15.05.23	29.05.23				5	5	22	32	4.800.000
			30.05.23	13.06.23				5	5	22	32	4.800.000
			15.09.23	29.09.23				5	5	22	32	4.800.000
			02.10.23	16.10.23				5	5	22	32	4.800.000
	27)	Biro Pengadaan barang dan Jasa	17.10.23	25.07.23				4	4	7	14	3.300.000
	28)	Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya.	20.11.23	30.11.23				9	9	18	32	5.400.000
	29)	Dinas ESDM	02.10.23	12.10.23				9	9	18	32	5.400.000

No.	FOKUS (2)	Sasaran (3)	Jadwal		PJ	HP			Anggaran (6)	Keterangan TUGAS (7)	
			RMP	RPL		WK/PJ	PT	KT			AT
				(4)				(5)			
	30)	Dinas Perhubungan	19.06.23	27.06.23			4	7	21	32	4.800.000
			04.12.23	12.06.23			4	7	21	32	4.800.000
	31)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03.04.23	11.04.23			3	6	18	27	4.050.000
			16.10.23	23.10.23			3	6	18	27	4.050.000
	32)	Biro Administrasi Pembangunan	20.11.23	28.11.23			4	7	21	32	4.800.000
	33)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	05.06.23	16.06.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.09.23	15.09.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.12.23	15.12.23			5	10	10	35	5.250.000
	34)	Dinas Kependudukan dan Cakil	05.06.23	16.06.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.09.23	15.09.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.12.23	15.12.23			5	10	10	35	5.250.000
	35)	Biro Organisasi	05.06.23	16.06.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.09.23	15.09.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.12.23	15.12.23			5	10	10	35	5.250.000
	36)	Dinas PMDT	05.06.23	24.07.23			10	10	10	40	6.000.000
	37)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.	06.11.23	01.12.23			10	10	10	40	6.000.000
	38)	Biro Pemerintahan dan Otda	02.05.23	02.06.23			10	10	10	40	6.000.000
			09.11.23	09.12.23			10	10	10	40	6.000.000
	39)	Dinas Kominfo	01.10.23	02.11.23			10	10	10	40	6.000.000
	40)	Badan Kesbangpol	01.10.23	02.11.23			10	10	10	40	6.000.000
	41)	Biro Hukum	08.05.23	15.06.23			10	10	10	40	6.000.000
			01.12.23	31.12.23			10	10	10	40	6.000.000
	42)	Sekretariat DPRD	02.05.23	02.06.23			6	6	6	24	3.600.000
			02.10.23	03.11.23			5	5	5	15	2.250.000
	43)	Badan Pengembangan SDM Daerah	04.09.23	04.10.23			8	8	8	32	4.800.000
	44)	Badan Kepegawaian Daerah.	05.06.23	16.06.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.09.23	15.09.23			5	10	10	35	5.250.000
			04.12.23	15.12.23			5	10	10	35	5.250.000

c. Reviu Laporan Keuangan.

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Keterangan TUGAS			
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)										(5)	(6)	(7)
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (REVIU LKPD)	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang	3.03.23	10.03.23	-	6	6	6	6	24	42	6.300.000	Auditor		

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Keterangan TUGAS				
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)										(5)	(6)	(7)	
1.	Probity Audit	Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki nilai signifikan dan Strategis (10 Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung)														AUDITOR
	1)	DINAS PENDIDIKAN	23.10.23	01.11.23	-	7	7	7	7	28	28	4.200.000				
	2)	DISPORA	13.07.23	30.07.23												
	3)	RSUDAM	11.12.23	26.12.23												
	4)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	01.06.23	01.07.23												
	5)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	28.08.23	28.09.23												
	6)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	01.08.23	04.08.23												
2.	Laporan Kinerja (reviu) Dokumen Sakip Provinsi dan Pendampingan SAKIP. Reviu Organisasi) Evaluasi (irban I-IV)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.														AUDITOR Dan PPUPD

No.	FOKUS (2)	Tujuan Sasaran (3)	Jadwal		HP				Anggaran (6)	Keterangan TUGAS (7)		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT	Jumlah
			(4)		(5)				(6)	(7)		
	1)	BAPPEDA	09.05.23	11.05.23			4	4	20	28	4.200.000	
	2)	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.05.23	16.05.23			3	3	15	21	3.150.000	AUDITOR Dan PPUPD
	3)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.05.23	22.05.23			3	3	15	21	3.150.000	
	4)	Badan Pendapatn Daerah	12.04.23	17.04.23			4	4	20	28	4.200.000	
	5)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	06.04.23	12.04.23			3	3	15	21	3.150.000	
	6)	Dinas Perkebunan	03.04.23	17.04.23			3	3	15	21	3.150.000	
	7)	BPKAD	03.04.23	06.04.23			4	4	20	28	4.200.000	
	8)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.04.23	12.04.23			3	3	15	21	3.150.000	
	9)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.04.23	17.04.23			3	3	15	21	3.150.000	
	10)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	03.04.23	05.04.23			4	4	20	28	4.200.000	
	11)	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan	06.04.23	11.04.23			3	3	15	21	3.150.000	
	12)	Badan Penelitian dan Pengembangan	12.04.23	14.04.23			3	3	15	21	3.150.000	
	13)	Biro Perekonomian	17.04.23	19.04.23			3	3	15	21	3.150.000	
	14)	Dinas Sosial										
	15)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.	02.04.23	04.04.23	6	6	24	36	72	144	21.600.000	
	16)	Dinas Tenaga Kerja										
	17)	Biro Umum										
	18)	Biro Kesejahteraan Rakyat										
	19)	Rumah Sakit Jiwa										
	20)	Badan Penghubung	01.05.23	02.05.23			3	3	12	18		
	21)	RSUD	01.05.23	02.05.23			5	5	20	40	3.750.000	
	22)	DISPORA	02.05.23	03.05.23			5	5	20	40	3.750.000	
	23)	Dinas PP dan PA	03.05.23	03.05.23			5	5	20	30	3.750.000	
	24)	Dinas Perpustakaan	01.05.23	01.05.23			5	5	30	40	4.500.000	
	25)	Biro Administrasi Pimpinan	02.05.23	04.02.23			5	5	20	30	4.500.000	
	26)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	10.04.23	14.04.23	-	-	5	5	20	30	4.500.000	
	27)	Biro Pengadaan barang dan Jasa	05.06.23	09.05.23			5	5	20	30	4.500.000	
	28)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	12.06.23	19.06.23	1	1	4	6	6	18	5.100.000	
	29)	Dinas Lingkungan Hidup	27.04.23	8.05.23	1	1	4	6	4	16	4.200.000	
	30)	Dinas Kehutanan.	11.05.23	19.05.23	1	1	4	6	4	16	4.200.000	
	31)	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.	03.05.23	10.05.23	6	6	6	6	6	30	4.500.000	
	32)	Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya.	11.05.23	19.05.23	6	6	6	6	6	30	4.500.000	
	33)	Dinas Perhubungan	02.05.23	08.05.23			5	5	20	30	4.500.000	
	34)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	09.05.23	12.05.23	4	4	4	4	16	28	4.200.000	
	35)	Biro Administrasi Pembangunan	22.05.23	26.05.23			5	5	20	30	4.500.000	
	36)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	08.05.23	08.06.23			4	4	16	28	4.200.000	
	37)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.	12.05.23	12.06.23			4	4	16	24	3.600.000	

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran	Keterangan TUGAS		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)										(6)	(7)
	38)	Biro Pemerintahan dan Otda.	19.05.23	19.06.23				4	4	16	24	3.600.000		
	39)	Dinas KOMINFO.	25.09.23	25.09.23				4	4	16	24	3.600.000		
	40)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	02.10.23	02.10.23				4	4	16	20	3.000.000		
	41)	Biro Hukum.	06.10.23	06.10.23				4	4	16	20	3.000.000		
	42)	Sekretariat DPRD.	10.04.23	10.05.23				4	4	12	28	4.200.000		
	43)	Badan Kepegawaian Daerah.	03.04.23	03.05.23				4	4	12	24	3.600.000		
	44)	Badan Pengembangan SDM Daerah.	14.04.23	14.05.23				4	4	12	24	3.600.000		
	45)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	02.05.23	05.05.23				4	4	12	24	3.600.000		
	46)	Dinas Kependudukan dan Cakil.	05.05.23	10.05.23				4	4	12	20	3.000.000		
	47)	Biro Organisasi.	10.05.23	15.05.23				4	4	12	20	3.000.000		
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyalangaraan pemerintahan daerah.	20.02.23	20.03.23		5	10	10	10	20	45	6.750.000	PPUPD	
4.	Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah (pemeriksaan dengan tujuan Tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.	01.01.23	04.04.23		20	50	50	100	100	220	45.000.000	Auditor	
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (evaluasi) (digabung dengan Reviu RKA)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.											AUDITOR dan PPUPD	

No.	FOKUS (2)	Tujuan Sasaran (3)	Jadwal (4)			HP (5)					Anggaran (6)	Keterangan TUGAS (7)	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah			
6.	Pengelolaan Keuangan Desa (monev)	<p>a) Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa lingkup daerah provinsi;</p> <p>b) evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dalam pengelolaan keuangan desa;</p> <p>c) evaluasi terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Bupati dalam peningkatan kapasitas aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa</p> <p>d) Reviu kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan BUM Desa</p> <p>e) Reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer kabupaten ke desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.</p>											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)			
	1)	KABUPATEN LAMPUNG UTARA											AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	27.04.23	20.04.23					3	3	12	18	10.500.000
		Tahap II	24.08.23	29.08.23					3	3	12	18	10.500.000
		Tahap III	09.11.23	16.11.23					3	3	12	18	10.500.000
	2)	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT											AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	17.04.23	20.04.23					3	3	12	18	10.500.000
		Tahap II	24.08.23	29.08.23					3	3	12	18	10.500.000
		Tahap III	13.11.23	16.11.23					3	3	12	18	10.500.000
	3)	KABUPATEN TULANG BAWANG											AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	18.04.23	20.04.23					3	3	12	18	10.594.000
		Tahap II	24.08.23	29.08.23					3	3	12	18	10.594.000
		Tahap III	13.11.23	16.11.23					3	3	12	18	10.594.000
	4)	KABUPATEN MESUJI											AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	17.04.23	20.04.23					3	3	12	18	10.630.000
		Tahap II	24.08.23	29.08.23					3	3	12	18	10.630.000
		Tahap III	13.11.23	16.11.23					3	3	12	18	10.630.000

	Tahap III	13.11.23	16.11.23	3	3	3	9	18		AUDITOR Dan PPUPD
13)	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN									
	Tahap I	17.04.23	20.04.23	4	4	4	12	20	31.430.000	
	Tahap II	24.08.23	29.08.23	3	3	3	9	21		
	Tahap III	13.11.23	16.11.23	4	4	4	12	20		

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP					Anggaran	Keterangan TUGAS				
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)									(5)	(6)	(7)	
7.	Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (OPD Pengampu SPM)	a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.													
	1)	SATPOLPP	05.06.23	24.07.23					5	5	5	15	2.250.000		
	2)	Dinas Pendidikan	05.06.23	09.06.23				5	5	5	20	3.000.000			
			04.09.23	08.09.23				5	5	5	20	3.000.000			
			04.12.23	08.12.23				5	5	5	20	3.000.000			
	3)	Dinas Kesehatan	04.05.23	04.06.23				4	4	4	20	3.000.000			
	4)	Dinas Sosial	04.05.23	04.06.23				4	4	4	20	3.000.000			
	5)	Rumah Sakit Jiwa	02.05.23	02.06.23				4	4	4	20	3.000.000			
	6)	RSUAM ABDOEL Moeloek	01.04.23	03.04.23	-			-	5	5	25	3.750.000			

4) PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS

No.	Fokus	SASARAN	Ruang Lingkup	Jadwal	Anggaran	Keterangan TUGAS
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.	Seluruh Perangkat Daerah	01.02.23 04.03.23	243,514,000.00	AUDITOR dan PPUPD
2.	Pengendalian Gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a) Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ atau penyelenggara negara; b) implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi. 2) Implementasi; 3) Pasca implementasi.	Seluruh Perangkat Daerah	01.01.23- 04.12.23		AUDITOR dan PPUPD
3.	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	a) Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPI; b) Pendampingan tindak lanjut survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.	Seluruh Perangkat Daerah	Juni - Oktober 2023		AUDITOR dan PPUPD
4.	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi. (irban I-IV)	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.	Seluruh Perangkat Daerah			
	1)	Dinas Sosial		02.03.23 - 04.03.23	19.800.000	AUDITOR dan PPUPD
	2)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.				
	3)	Dinas Tenaga Kerja				
	4)	Biro Umum				
	5)	Biro Kesejahteraan Rakyat				
	6)	Rumah Sakit Jiwa				
	7)	BAPPEDA				
	8)	Dinas Kelautan dan Perikanan		01.03.23	3.150.000	
	9)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		01.03.23	3.150.000	
	10)	Badan Pendapatan Daerah		01.03.23	3.150.000	
	11)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		01.03.23	3.150.000	

Fokus	SASARAN	Ruang Lingkup	Jadwal	Anggaran	Keterangan TUGAS
12)	Dinas Perkebunan		01.03.23	3.150.000	
13)	BPKAD		01.03.23	3.150.000	
14)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		01.03.23	3.150.000	
15)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		01.03.23	3.150.000	
16)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		01.03.23	3.150.000	
17)	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan		01.03.23	3.150.000	
18)	Badan Penelitian dan Pengembangan		01.03.23	3.150.000	
19)	Biro Perekonomian		01.03.23	3.150.000	
20)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		01.03.23	3.150.000	
21)	Biro Pengadaan barang dan Jasa		06.03.23	900.000	
22)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.		07.03.23	1.500.000	
23)	Dinas Lingkungan Hidup		01.02.23	1.500.000	
24)	Dinas Kehutanan.		15.03.23	1.050.000	
25)	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.		10.03.23	1.050.000	
26)	Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya		06.03.23	1.200.000	
27)	Dinas Perhubungan		01.03.23	1.200.000	
28)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		07.03.23	1.800.000	
29)	Biro Administrasi Pembangunan		08.03.23	900.000	
30)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.		09.03.23	900.000	
31)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.		01.03.23		
32)	Biro Pemerintahan dan Otda.		01.03.23		
33)	Dinas KOMINFO.		01.03.23		
34)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.		01.03.23		
35)	Biro Hukum.		01.03.23		
36)	Sekretariat DPRD.		01.03.23		
37)	Badan Kepegawaian Daerah.		01.03.23		
38)	Badan Pengembangan SDM Daerah.		01.03.23		
39)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.		01.03.23		
40)	Dinas Kependudukan dan Capil.		01.03.23		
41)	Biro Organisasi.		01.03.23		

No.	Fokus	SASARAN	Ruang Lingkup	Jadwal	Anggaran	Keterangan TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Asistensi Pembanguan Reformasi Birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat drah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi : a) Sistem pengendalian intern Pemerintah; b) Pengelolaan WBS; c) Kapabilitas APIP; d) Penilaian Internal Zona Integritas; e) Penangan Benturan Kepentingan; f) Penanganan Laporan Pengaduan.	Seluruh Perangkat Daerah	Januari - Desember 2023		AUDITOR dan PPUPD
6.	Capaian Aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan dengan Strategi nasional pencegahan korupsi. (STRANAS-PK).	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi.	Area Intervensi Stranas PK	Januari - Desember 2023	172,929,000	AUDITOR dan PPUPD
7	Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan korupsi.	7 Area Intervensi MCP KPK	Januari - Desember 2023		AUDITOR dan PPUPD
8.	Operasional Sapu Bersih Pengutan Liar	Meyakinkan pelayanan public di Masing-Masing pemerintah daerah telah bersih dari Pungutan Liar.	Se-Provinsi Lampung	Januari - Desember 2023	1.1.000.000.000	AUDITOR dan PPUPD
9	Pemeriksaan Investigatif.	Penanganan Pengaduan terkait dengan : a) Penyalahgunaan wewenang; b) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c) Indikasi korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau d) Pelanggaran Disiplin Pegawai.	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota	Januari - Desember 2023	498.760.000	AUDITOR dan PPUPD
10	Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan APH dakan Penanganan	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian Kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan penegak Hukum. b) Perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah.	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota	Januari - Desember 2023		AUDITOR dan PPUPD

	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Korupsi.				
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut yang berlarut-larut penyelesaiannya.	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota	Januari – Desember 2023	575.640.000 sekretariat inspektorat

5) PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kapabilitas APIP Level 3	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b) Pengelolaan sumber daya manusia; c) Praktik profesional; d) Akutabilitas dan manajemen kinerja; e) Budaya dan hubungan organisasi; dan f) Struktur dan tata Kelola; 	Januari – Desember 2023	45.000.000	
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	<p>Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lingkungan Pengendalian; b) Penilaian resiko; c) Kegiatan pengendalian; d) Informasi dan komunikasi; e) Pemantauan pengendalian intern. 	Januari – Desember 2023	300,022,000	
3.	Penerapan manajemen Resiko	<p>Asistensi penerapan manajemen resiko indeks, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Infrastruktur; <ul style="list-style-type: none"> i. Kepemimpinan; ii. Strategi dan kebijakan manajemen; iii. Sumber daya manusia; iv. Kemitraan; v. Proses manajemen resiko. b) Hasil: 	Januari – Desember 2023		

4.	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 Jam pertahun	<p>i. Aktifitas penanganan resiko</p> <p>ii. outcomes.</p> <p>Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <p>a) audit kinerja;</p> <p>b) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko;</p> <p>d) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>e) teknik revaluasi dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</p> <p>f) audit investigasi;</p> <p>g) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>h) pemeriksaan dana alokasi khusus;</p> <p>i) sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan</p> <p>j) Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</p>	Januari – Desember 2023	753,239,000.00	
----	---	--	-------------------------	----------------	--

6) KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAINNYA.

No.	Fokus (1)	SASARAN (2)	Jadwal		PJ	HP			Jumlah	Anggaran	Keterangan Tugas	
			RMP	RPL		WK/PJ	PT	KT				AT
a.	Reviu HPS (10 Paket Strategis)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas kesesuaian sinkronisasi SSH, ASB/HSPK, nilai harga pasar yang berlaku saat pelaksanaan kegiatan PBJ pada 10 Paket Strategis										
	1)	Dinas Pendidikan	27.03.23	31.03.23	5	5	5	5	15	30	4.500.000	Auditor
	2)	RSUDAM	13.02.23	26.02.23	-	4	4	4	12	24	3.000.000	
	3)	Dispora	17.03.23	27.03.23	-	4	4	4	8	20	2.400.000	
	4)	Dinas Peternakan dan kesehatan hewan	20.02.23	03.03.23		5	5	5	15	25	4.500.000	
	5)	DINAS BMBK	18.01.23	24.01.23		4	4	4	8	16	3.000.000	
			25.01.23	30.01.23		4	4	4	8	16	3.000.000	
			31.01.23	03.02.23		4	4	4	8	16	3.000.000	
			04.01.23	09.02.23		4	4	4	8	16	3.000.000	
	6)	Dinas PSDA	16.2.2023	23.2.2023		4	4	4	8	16	3.000.000	
b	Reviu DAK.	Memberikan keyakinan Secara terbatas atas penyalura dan penyerapan Serta Capaian Output										
	1)	Dinas Pendidikan	13.02.23	17.02.23	5	5	5	5	5	20	3.000.000	Auditor
			10.07.23	14.07.23	5	5	5	5	5	20	3.000.000	
			18.09.23	22.09.23	5	5	5	5	5	20	3.000.000	
	2)	DAK pada Dinas Kesehatan (untuk 4 Program/Kegiatan)	03.02.23	04.02.23	1	2	5	5	25	38	5.700.000	
			03.03.23	04.03.23	1	2	5	5	25	38	5.700.000	
			04.04.23	01.05.23	1	2	5	5	25	38	5.700.000	
			04.05.23	01.06.23	1	2	5	5	25	38	5.700.000	
			02.08.23	03.08.23	1	2	5	5	20	38	5.700.000	
			01.09.23	02.09.23	1	2	5	5	20	38	5.700.000	
			02.10.23	03.10.23	1	2	5	5	20	38	5.700.000	
			03.11.23	04.11.23	1	2	5	5	20	38	5.700.000	
	3)	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	02.05.23	08.05.23		5	5	5	15	25	3.750.000	
			25.08.23	31.08.23		5	5	5	15	25	3.750.000	
			06.11.23	10.11.23		5	5	5	15	25	3.750.000	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP				Anggaran	Keterangan Tugas		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)								(6)	(7)
	4)	Dinas Kelautan dan Perikanan	02.05.23	08.06.23			5	5	15	25	3.750.000	
			25.08.23	19.10.23			5	5	15	25	3.750.000	
			06.11.23	16.12.23			5	5	15	25	3.750.000	
	5)	Reviu Sisa DAK. (BPKAD)	20.01.23	25.01.23			4	4	12	20	3.000.000	
	6)	DINAS BMBK	10.02.23	15.02.23			2	8	8	8	10.500.000	
							2	2	4	8		
							2	2	4	8		
							2	2	4	8		
							2	2	4	8		
	7)	Dinas PSDA	24.2.23	1.3.23			4	4	8	16	3.000.000	
			22.5.23	25.2.23			4	4	8	16	3.000.000	
			20.11.23	23.11.23			4	4	8	16	3.000.000	
c.	Reviu Promosi dan Mutasi ASN. (MCP KPK)	Badan Kepegawaian Daerah	02.10.23	27.10.23		4	4	4	4	16	2.400.000	PPUPD
d.	Reviu Benturan Kepentingan	Badan Kepegawaian Daerah	06.10.23	31.10.23		4	4	4	8	20	3.000.000	Auditor dan PPUPD
e.	Pengawasan CPNS/PPPK	Badan Kepegawaian Daerah	27.03.23	20.04.23		4	4	4	8	20	3.000.000	Auditor dan PPUPD
f.	Reviu SSH, ASB, HSPK (MCP KPK)	REVIU SSH REVIU ASB REVIU HSPK	24.07.23 15.05.23 25.08.23	28.07.23 19.05.23 31.08.23			4 4 4	4 4 4	8 8 8	16 16 16	2.400.000 2.400.000 2.400.000	Auditor
g.	Reviu Kinerja PBJ.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	05.06.23	16.06.23			10	10	50	70	10.500.000	Auditor
h.	Penjaminan Kualitas SPIP	Melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Perangkat Daerah sebagai bagian dari Implementasi Pembangunan SPIP menurut PERBAN BPKP NO 5 Tahun 2021.										Auditor dan PPUPD
	1)	BAPPEDA	03.05.23	06.05.23			3	3	15	21	3.150.000	
	2)	Dinas Kelautan dan Perikanan	06.05.23	12.05.23			3	3	15	21	3.150.000	
	3)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.05.23	17.05.23			3	3	15	21	3.150.000	

No.	Fokus (2)	SASARAN (3)	Jadwal		HP				Anggaran	Keterangan Tugas (7)
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT		
(1)				(4)	(5)	(6)				
4)	Dinas Perkebunan		03.05.23	06.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
5)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		06.05.23	12.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
6)	Badan Pendapatan Daerah		12.05.23	17.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
7)	BPKAD		02.05.23	4.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
8)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.05.23	9.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
9)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		10.05.23	12.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
10)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		09.05.23	10.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
11)	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan		11.05.23	12.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
12)	Badan Penelitian dan Pengembangan.		15.05.23	16.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
13)	Biro Perekonomian		17.05.23	19.05.23	3	3	15	21	3.150.000	
14)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.		01.04.23	02.04.23	2	2	20	34	5.100.000	
15)	Dinas Tenaga Kerja		01.04.23	02.04.23	2	3	15	30	4.500.000	
16)	Badan Penghubung		01.05.23	02.05.23		3	9	15	4.500.000	
17)	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek		04.05.23	01.06.23		4	12	18	4.500.000	
18)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA		01.06.23	02.06.23		4	12	18	4.500.000	
19)	Dinas Pemuda dan Olahraga		04.05.23	04.05.23		4	16	20	4.500.000	
20)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		04.05.23	01.06.23		4	16	20	4.500.000	
21)	Biro Umum									
22)	Biro Administrasi Pimpinan									
23)	Biro Kesejahteraan Rakyat									
24)	Rumah Sakit Jiwa									
25)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		24.07.23	28.07.23		5	20	30	4.500.000	
26)	Biro Pengadaan barang dan Jasa		19.06.23	20.06.23		2	20	30	1.800.000	
27)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.		27.7.23	3.8.23		3	5	38	4.200.000	
28)	Dinas Lingkungan Hidup		4.8.23	9.8.23		3	4	24	3.300.000	

No.	Fokus (2)	SASARAN (3)	Jadwal			HP					Anggaran (6)	Keterangan Tugas (7)		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah				
(1)				(4)					(5)					
	4)	Dinas Perkebunan	01.11.23	03.11.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	5)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	03.11.23	07.11.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	6)	Badan Pendapatan Daerah	07.11.23	09.11.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	7)	BPKAD	01.11.23	03.11.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	8)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	03.11.23	06.11.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	9)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	07.11.23	09.11.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	10)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	06.10.23	09.10.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	11)	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan	10.10.23	11.10.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	12)	Badan Penelitian dan Pengembangan.	12.10.23	13.10.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	13)	Biro Perekonomanian	16.10.23	17.10.23				2	2	2	10	14	2.100.000	
	14)	Dinas Sosial												
	15)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.												
	16)	Dinas Tenaga Kerja	01.07.23	02.07.23	3	6	12	12	12	42	75	11.250.000		
	17)	Biro Umum												
	18)	Biro Kesejahteraan Rakyat												
	19)	Rumah Sakit Jiwa												
	20)	Badan Penghubung	01.11.23	02.11.23				3	3	9	15	3.600.000		
	21)	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	02.11.23	02.11.23		4		3	3	9	15			
	22)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	03.11.23	04.11.23				2	2	8	12	3.000.000		
	23)	Dinas Pemuda dan Olahraga	02.11.23	04.11.23				3	3	9	15			
	24)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	02.11.23	01.11.23				2	2	8	12			
	25)	Biro administrasi Pimpinan	03.11.23	03.11.23				2	2	8	12			
	26)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	01.11.23	06.11.23				4	4	16	24	3.600.000		

No. (1)	Fokus (2)	SASARAN (3)	Jadwal		HP							Anggaran (6)	Keterangan Tugas (7)	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah				
27)		Biro Pengadaan barang dan Jasa	07.11.23	08.11.23					2	2	16	24	1.800.000	
28)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	15.11.23	21.11.23				4	4	4	16	24	3.900.000	
29)		Dinas Lingkungan Hidup	22.11.23	24.11.23				3	3	3	12	18	2.700.000	
30)		Dinas Kehutanan.	27.11.23	28.11.23				2	2	2	8	12	1.800.000	
31)		Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya	27.11.23	30.11.23		4		4	4	4	8	20	3.000.000	
32)		Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.	22.11.23	24.11.23		3		3	3	3	6	15	2.200.000	
33)		Dinas Perhubungan	06.11.23	08.11.23				3	3	3	12	18	2.700.000	
34)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.11.23	15.11.23				3	3	3	12	18	2.700.000	
35)		Biro Administrasi Pembangunan	20.11.23	22.11.23				3	3	3	12	18	2.700.000	
36)		Inspektorat												
37)		Dinas Pendidikan	03.11.23	07.11.23			2	2	2	2	6	12	1.800.000	
38)		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	07.11.23	09.11.23				2	2	2	6	12	1.800.000	
39)		Biro Organisasi	09.11.23	13.11.23				2	2	2	6	12	1.800.000	
40)		Dinas PMDT	03.11.23	07.11.23				3	3	3	12	18	2.700.000	
41)		Kantor SATPOLPP	07.11.23	09.11.23				2	2	2	8	12	1.800.000	
42)		BIRO TAPEM	09.11.23	13.11.23				2	2	2	8	12	1.800.000	
41)		Dinas Kominfo	03.11.23	07.11.23			3	3	3	3	9	18	2.700.000	
42)		Badan KESBANGPOL	07.11.23	09.11.23				2	2	2	8	12	1.800.000	
43)		Biro Hukum	09.11.23	13.11.23				2	2	2	8	12	1.800.000	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP					Anggaran	Keterangan Tugas		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)									(6)	(7)
	43)	Sekretariat DPRD	04.12.23	04.01.24			3	3	12	18	2.700.000		
	44)	Badan Pengembangan SDM Daerah.	07.12.23	07.01.24			2	2	8	12	1.800.000		
	45)	Badan Kepegawaian Daerah.	11.12.23	11.01.24			2	2	8	12	1.800.000		
j.	Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.	Tujuan ditetapkan berdasarkan analisis dari factor yang ada dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis untuk : 1) Mewujudkan birokrasi bersih, kompeten dan melayani; 2) Terwujudnya aparat pengawas pemerintah yang kapabel; 3) Terwujudnya sinergitas dalam penganggaran yang mendukung visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.										Auditor & PPUPD	
		1. Tanggamus	04.05.23	02.06.23	-	-	5	5	45	55	31.955.000		
		2. Lampung Utara	18.09.23	18.10.23	-	6	6	6	30	48	32.396.000		
k.	Monitoring Penyerapan APBD											Auditor	
	1)	BAPPEDA	01.08.23	03.08.23			2	2	4	8	1.200.000		
	2)	Dinas Kelautan dan Perikanan	03.08.23	07.08.23			2	2	4	8	1.200.000		
	3)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	07.08.23	09.08.23			2	2	4	8	1.200.000		
	4)	Dinas Perkebunan	01.08.23	03.08.23			2	2	4	8	1.200.000		
	5)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	03.08.23	07.08.23			2	2	4	8	1.200.000		
	6)	Badan Pendapatan Daerah	07.08.23	09.08.23			2	2	4	8	1.200.000		
	7)	BPKAD	01.08.23	03.08.23			2	2	4	8	1.200.000		
	8)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	03.08.23	07.08.23			2	2	4	8	1.200.000		

No.	Fokus (2)	SASARAN (3)	Jadwal		HP				Anggaran	Keterangan Tugas (7)			
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT	Jumlah	
(1)			(4)		(5)				(6)				
9)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		07.08.23	09.08.23				2	2	4	8	1.200.000	
10)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		17.08.23	18.08.23				2	2	4	8	1.200.000	
11)	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan		15.08.23	16.08.23				2	2	4	8	1.200.000	
12)	Badan Penelitian dan Pengembangan.		21.08.23	22.08.23				2	2	4	8	1.200.000	
13)	Biro Perencanaan		23.08.23	24.08.23				2	2	4	8	1.200.000	
14)	Dinas Sosial												
15)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.												
16)	Dinas Tenaga Kerja												
17)	Dinas Pemuda dan Olahraga		1/03/2023	07/03/2023				5	5	20	30	4.500.000	
18)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA		8/03/2023	10/03/2023				3	3	12	18	2.700.000	
19)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan												
20)	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moelock												
21)	Badan Penghubung												
22)	Biro Kesejahteraan Rakyat												
23)	Biro Administrasi Pimpinan												
24)	Biro Umum												
25)	Rumah Sakit Jiwa												
26)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		10.07.23	13.07.23				2	2	8	8	1.800.000	
27)	Biro Pengadaan barang dan Jasa		14.07.23	19.07.23				2	2	8	8	1.800.000	
28)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.		10.8.23	16.3.23				2	2	5	10	1.650.000	
29)	Dinas Lingkungan Hidup		18.8.23	22.8.23				2	2	5	10	1.650.000	
30)	Dinas Kehutanan.		23.8.23	25.8.23				2	2	5	10	1.650.000	
31)	Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya.		10.7.23	13.7.23				2	2	8	8	1.800.000	
32)	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.		14.07.23	19.07.23				2	2	8	8	1.800.000	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP				Anggaran	Keterangan Tugas		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)	(7)		
		Dinas Perkebunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP BADAN PENDAPATAN DAERAH	01.08.23 03.08.23 07.08.23	03.08.23 07.08.23 09.08.23	- - -	- - -	2 2 2	2 2 2	4 4 4	8 8 8	1.200.000 1.200.000 1.200.000	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Balitbang Provinsi Lampung Biro Perekonomian	17.08.23 15.08.23 21.08.23 23.08.23	18.08.23 16.08.23 22.08.23 24.08.23	- - - -	- - - -	2 2 2 2	2 2 2 2	4 4 4 4	8 8 8 8	1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000	
		BPKAD Dinas Perindustrian Dinas Koperasi dan UKM	01.08.23 03.08.23 07.08.23	03.08.23 07.08.23 09.08.23	- - -	- - -	2 2 2	2 2 2	4 4 4	8 8 8	1.200.000 1.200.000 1.200.000	
		BAPPEDA Dinas Kelautan Dinas Peternakan	01.08.23 03.08.23 07.08.23	03.08.23 07.08.23 09.08.23	- - -	- - -	2 2 2	2 2 2	4 4 4	8 8 8	1.200.000 1.200.000 1.200.000	
		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Biro Pengadaan barang dan Jasa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan. Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman CK Dinas Energi dan Sumber daya Mineral. Dinas Perhubungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.02.2 22.02.23 9.03.23 22.02.23 1.03.23 10.02.23 15.02.23 20.02.23 06.03.23	21.02.23 27.02.23 17.03.23 28.02.23 8.03.23 14.02.23 17.02.23 22.02.23 08.03.23	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	2 2 3 3 3 2 2 1 1	2 2 3 3 3 2 2 3 3	8 8 5 5 5 8 8 9 9	16 16 10 10 10 16 16 13 13	1.800.000 1.800.000 1.650.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000 1.950.000 1.950.000	
m.	Pengawasan Pelayanan Publik	Menilai kepatuhan dan ketaatan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.										PPUPD
		Dinas Pendidikan	01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	4	16	2.400.000	
		Disdukcapil	01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	4	16	2.400.000	
		Biro Organisasi	01.02.23	02.03.23	4	4	4	4	4	16	2.400.000	
		Dinas PMDT	27.03.23	18.04.23			5	5	5	15	2.250.000	
		Dinas Kominfo	27.03.23	18.04.23			5	5	5	15	2.250.000	
		Badan Kesbangpol	04.04.23	24.04.23			5	5	5	15	2.250.000	
		Sekretariat Dewan	27.03.23	18.04.23			5	5	5	15	2.250.000	

No.	Fokus (2)	SASARAN (3)		Jadwal (4)		PJ	WK/PJ	HP (5)			Jumlah	Anggaran (6)	Keterangan Tugas (7)
		RMP	RPL	RMP	RPL			PT	KT	AT			
				15.04.23	15.05.23			5	5	5	15	2.250.000	
		BPSDM		02.05.23	03.11.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Kesehatan (BNH)		02.05.23	04.12.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Sosial		02.05.23	01.01.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Rumah Sakit Jiwa		01.03.23	10.03.23			3	3	12	18	2.250.000	
		RSUDAM		06.03.23	15.03.23			3	3	12	18	2.250.000	
		Dinas Perpustakaan		19.06.23	27.03.23			3	3	12	18	2.250.000	
		Dinas PPPA		01.03.23	02.04.23			4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Perkebunan		01.03.23	02.04.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP		01.03.23	02.04.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Badan Pendapatan Daerah		01.02.23	02.03.23		5	5	5	10	25	3.750.000	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung		01.12.23	01.01.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung		01.03.23	02.04.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung		01.12.23	01.01.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
		Balitbang Provinsi Lampung		01.04.23	02.05.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		BPKAD		01.03.23	02.04.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Perindustrian		01.12.23	01.01.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Koperasi dan UKM		01.04.23	02.05.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		BAPPEDA		18.09.23	18.10.23		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Kelautan		20.06.23	01.07.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Dinas Peternakan		04.12.23	02.01.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
		Biro Pengadaan barang dan Jasa		02.02.23	02.03.23			5	5	15	25	3.750.000	

No.	Fokus (2)	SASARAN (3)	Jadwal		PJ	WK/PJ	HP			Jumlah	Anggaran	Keterangan Tugas (7)
			RMP	RPL			PT	KT	AT			
(1)			(4)				(5)			(6)		
		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	04.02.23	04.03.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas Kehutanan.	01.03.23	01.04.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman CK	01.04.23	01.05.23			5	5	15	25	3.750.000	
		BPBD	03.03.23	03.04.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	04.03.23	04.04.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas Lingkungan Hidup	01.04.23	01.05.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas Perhubungan	04.02.23	04.03.23			5	5	15	25	3.750.000	
n.	PENGAWASAN KONKUREN	Dinas Kominfotik	01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	4	20	3.000.000	PPUPD
		Badan Kesbangpol	01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	4	20	3.000.000	
		Dinas Pendidikan	01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	4	16	2.400.000	
		DISDUKCAPIL	01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	4	16	2.400.000	
		Dinas Kesehatan	01.11.23	03.11.23			5	5	10	25	3.750.000	
		Dinas Sosial	02.12.23	04.12.23			5	5	10	25	3.750.000	
		Dinas Tenaga Kerja	03.12.23	01.01.24			5	5	10	25	3.750.000	
		Dinas Pemuda Dan Olahraga	01.12.23	02.12.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas PPPA	02.12.23	04.12.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Rsudam	03.12.23	04.12.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas Perpustakaan	04.12.23	04.12.23			5	5	15	25	3.750.000	
		Dinas Perkebunan	01.03.23	02.04.23			5	5	10	20	3.000.000	
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	01.03.23	02.04.23			5	5	10	20	3.000.000	
		Dinas Ketahanan Pangan	27.09.23 26.05.23	27.10.23 26.06.23			5 5	5 5	10 10	20 20	3.000.000 3.000.000	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP				Anggaran	Keterangan Tugas			
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)	(7)			
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.06.23	14.07.23				5	5	10	20	3.000.000	
		Dinas Koperasi	01.09.23	01.10.23				5	5	10	20	3.000.000	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	01.08.23	01.09.23				5	5	10	20	3.000.000	
		Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPTD Kelautan	19.07.23 20.06.23	05.08.23 20.07.20				5	5	10	20	3.000.000	
		Dinas Peternakan dan Keswan	23.11.23	23.12.23				5	5	10	20	3.000.000	
		Dinas Kehutanan.	03.11.23	03.12.23				7	7	21	35	5.250.000	
		Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman CK	03.08.23	03.09.23				7	7	21	35	5.250.000	
		BPBD	03.09.23	03.10.23				7	7	21	35	5.250.000	
		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	01.12.23	04.12.23				7	7	21	35	5.250.000	
		Dinas Lingkungan Hidup	03.10.23	03.11.23				7	7	21	35	5.250.000	
		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	02.08.23	02.09.23				7	7	21	35	5.250.000	
		Dinas Perhubungan	03.12.23	03.01.24				7	7	21	35	5.250.000	
o.	Monev BOS												AUDITOR DAN PPUPD
	1)	Kabupaten Lampung Timur	21.08.23	21.09.23	2	6	6	6	6	18	38	25.929.000	
	2)	Kabupaten Lampung Selatan	07.08.23	07.09.23	2	6	6	6	6	24	44	25.698.000	
	3)	Kota Metro	25.09.23	05.10.23	2	5	5	5	5	17	30	25.824.000	
	4)	Kabupaten Lampung Tengah	04.09.23	05.10.23	2	6	6	6	6	24	44	25.618.000	
	5)	Bandar Lampung	03.08.23	03.09.23	1	2	2	5	5	40	53	7.950.000	
	6)	Pesawaran	01.08.23	01.09.23	1	2	2	5	5	40	53	25.552.000	
	7)	Kabupaten Pringsewu	01.08.23	04.08.23				7	7	21	35	25.614.000	
	8)	Kabupaten Tanggamus	01.08.23	04.08.23				6	6	24	36	25.740.000	
	9)	Kabupaten Lampung Utara	21.09.23	29.09.23	-	3	5	5	5	20	33	25.824.000	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		PJ	HP			Jumlah	Anggaran	Keterangan Tugas	
			RMP	RPL		WK/PJ	PT	KT				AT
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6)	(7)			
	10)	Kabupaten Tulang Bawang Barat	25.09.23	05.10.23	-	5	5	5	20	33	25.929.000	
	11)	Kabupaten Tulang Bawang	25.09.23	05.10.23		3	5	5	20	33	25.824.000	
	12)	Kabupaten Mesuji	25.09.23	05.10.23		3	5	5	20	33	25.992.000	
	13)	Kabupaten Way Kanan	03.05.23	03.06.23		1	3	3	18	25	25.920.000	
	14)	Kabupaten Pesisir barat	27.07.23	26.07.23		5	5	5	35	50	25.420.000	
	15)	Kabupaten Lampung Barat.	03.05.23	03.06.23		4	4	4	20	32	25.950.000	
P.	Kebijakan Strategis KDH/BOSDA											AUDITOR DAN PPUPD
1)		Kabupaten Lampung Tengah	14.09.23	14.10.23		2	2	2	8	14	7.042.000	
2)		Kabupaten Lampung Timur	02.09.23	02.10.23		2	2	2	8	14	7.042.000	
3)		Kabupaten Lampung Selatan	15.08.23	15.09.23		2	2	2	6	12	7.600.000	
4)		KOTA METRO	03.10.23	05.10.23		2	2	2	6	12	7.656.000	
5)		Kabupaten Pringsewu	04.8.23	04.8.23			2	2	10	14	7.620.000	
6)		Kabupaten Tanggamus	03.8.23	04.8.23			2	2	8	12	7.620.000	
7)		Kota Bandar Lampung	04.08.23	04.08.23			2	2	10	14		
8)		Kabupaten Pesawaran	03.08.23	04.08.23			2	2	8	12	7.548.000	
9)		Kabupaten Lampung Utara	04.10.23	04.10.23		2	2	2	8	14	7.656.000	
10)		Kabupaten Tulang Bawang Barat	03.10.23	05.10.23		2	2	2	8	14	7.701.000	
11)		Kabupaten Tulang Bawang	03.10.23	05.10.23		2	2	2	8	14	7.656.000	
12)		Kabupaten Mesuji	03.10.23	05.10.23		2	2	2	8	14	7.728.000	
13)		Kabupaten Way Kanan	03.05.23	03.06.23			2	2	12	16	7.704.000	
14)		Kabupaten Pesisir barat	17.07.23	18.07.23		2	2	2	14	20	7.490.000	
15)		Kabupaten Lampung Barat.	03.05.23	03.06.23		2	2	2	10	16	7.704.000	

No.	Fokus (2)	SASARAN (3)	Jadwal		HP							Anggaran (6)	Keterangan Tugas (7)	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah				
q.	PENGAWASAN NSPK DALAM PELAKSANAAN URUSAN													
	1)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	01.06.23 01.11.23	02.07.23 02.12.23				10 10	10 10	20 20	40 40	6.000.000 6.000.000		
	2)	DPMPTSP	01.08.23	02.09.23				5	5	10	20	3.000.000		
	3)	DINAS PERKEBUNAN	01.09.23	02.10.23				5	5	10	20	3.000.000		
	4)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI DAN KREATIF	14.06.23	26.07.23				5	5	10	20	3.000.000		
	5)	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	27.09.23 26.05.23	11.10.23 13.06.23				6 6	6 6	12 12	24 24	3.600.000 3.600.000		
	6)	BALITBANGDA	02.11.23	15.11.23				5	5	10	20	3.000.000		
	7)	BPKAD	05.06.23 04.12.23	19.06.23 15.12.23				10 10	10 10	20 20	40 40	6.000.000 6.000.000		
	8)	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	01.08.23	02.09.23				5	5	10	20	3.000.000		
	9)	DINAS KOPERASI DAN UKM	01.09.23	02.10.23				5	5	10	20	3.000.000		
	10)	DINAS KELAUTAN	27.06.23	27.07.23				5	5	10	20	3.000.000		
	11)	BAPPEDA	15.08.23	14.09.23	-			10	10	20	40	6.000.000		
	12)	DINAS PETERNAKAN	11.10.23	11.11.23	-			5	5	10	20	3.000.000		
	13)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.	01.09.23	03.09.23				5	5	10	25	3.750.000		
	14)	Dinas Sosial	02.11.23	04.11.23				5	5	10	25	3.750.000		
	15)	Dinas Tenaga Kerja	04.11.23	02.12.23				5	5	10	25	3.750.000		
	16)	Rumah Sakit Jiwa	04.07.23	02.08.23				5	5	10	25	3.750.000		
	17)	Biro Umum	02.07.23	04.07.23				5	5	10	25	3.750.000		

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP				Anggaran	Keterangan Tugas		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)	(7)
18)		Biro Kesejahteraan Rakyat	02.09.23	04.09.23		5	5	5	10	25	3.750.000	
19)		Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	01.06.23 04.11.23	02.06.23 01.12.23			5 4	5 4	15 12	25 20	3.750.000 3.000.000	
20)		Dinas Pemuda dan Olahraga	02.04.23 01.09.23	03.04.23 02.09.23			5 4	5 4	15 12	25 20	3.750.000 3.000.000	
21)		Biro Administrasi Pimpinan	02.04.23	04.04.23			4	4	12	20	3.000.000	
22)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	02.06.23	03.06.23			4	4	12	20	3.000.000	
23)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	01.07.23	02.07.23			4	4	12	20	3.000.000	
24)		Badan Penghubung	01.05.23	01.05.23			3	3	12	18	3.000.000	
25)		Biro Pengadaan barang dan Jasa	01.06.23	01.07.23			7	7	21	35	5.250.000	
26)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	03.06.23	03.07.23			7	7	21	35	5.250.000	
27)		Dinas Kesehatan.	03.07.23	03.08.23			7	7	21	35	5.250.000	
28)		Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Cipta Karya.	02.06.23	02.07.23			7	7	21	35	5.250.000	
29)		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03.10.23	03.11.23			7	7	21	35	5.250.000	
30)		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	01.12.23	04.12.23			7	7	21	35	5.250.000	
31)		Dinas Lingkungan Hidup	03.10.23	03.11.23			7	7	21	35	5.250.000	
32)		Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.	01.08.23	01.09.23			7	7	21	35	5.250.000	
33)		Dinas Perhubungan	04.11.23	04.12.23			7	7	21	35	5.250.000	
34)		Biro Administrasi Pembangunan	03.11.23	03.12.23			7	7	21	35	5.250.000	
35)		Inspektorat	04.09.23				5	10	10	25	-	
36)		Dinas Pendidikan	05.06.23 04.09.23 04.12.23	16.06.23 15.09.23 15.12.23		5 5 5	10 10 10	10 10 10	10 10 10	35 35 35	5.250.000 5.250.000 5.250.000	
37)		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	05.06.23 04.09.23 04.12.23	16.06.23 15.09.23 15.12.23		5 5 5	10 10 10	10 10 10	10 10 10	35 35 35	5.250.000 5.250.000 5.250.000	

No.	Fokus (2)	SASARAN (3)	Jadwal		HP				Anggaran (6)	Keterangan Tugas (7)	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT			AT
(1)				(4)				(5)			
	38)	Biro Organisasi	05.06.23	16.06.23		5	10	10	10	35	5.250.000
			04.09.23	15.09.23		5	10	10	10	35	5.250.000
			04.12.23	15.12.23		5	10	10	10	35	5.250.000
	39)	Dinas PMDT	02.05.23	02.06.23			10	10	10	30	4.500.000
			09.10.23	09.11.23			10	10	10	30	4.500.000
	40)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	05.06.23	24.07.23			5	5	5	15	2.250.000
	41)	Biro Tata Pemerintahan dan Otda	06.11.23	01.12.23			10	10	10	30	4.500.000
	42)	Dinas Kominfo	02.05.23	02.06.23			10	10	10	30	4.500.000
			09.11.23	09.12.23			10	10	10	30	4.500.000
	43)	Badan KESBANGPOL	01.10.23	02.11.23			10	10	10	30	4.500.000
	44)	Biro Hukum	01.10.23	02.11.23			10	10	10	30	4.500.000
	45)	Sekretariat DPRD	08.05.23	15.06.23			10	10	10	30	4.500.000
			01.12.23	31.12.23			10	10	10	30	4.500.000
	46)	Badan Pengembangan SDM Daerah.	02.05.23	02.06.23			6	6	6	18	3.240.000
			02.10.23	03.11.23			5	5	5	15	2.250.000
	47)	Badan Kepegawaian Daerah.	04.09.23	04.10.23			8	8	8	24	3.600.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI